

DISABILITAS-PERLINDUNGAN

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

ABSTRAK : - Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan hukum di tingkat daerah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitas dan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas.

- Peraturan Daerah ini memuat :

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup dan Tujuan
3. Hak Penyandang Disabilitas
4. Ragam Penyandang Disabilitas
5. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
6. Partisipasi Masyarakat
7. Pengarustamaan Penyandang Disabilitas
8. Pembiayaan
9. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas
10. Larangan
11. Sanksi Administratif
12. Penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah terdiri dari 12 BAB dan 135 Pasal.
- Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.